



Kelayakan Penataan Lokasi Strategis PKL pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya

Damar Sulistiyono, Dheva Nafis Ardhan Wisesa, Gian Mahardika Setia Budi*
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author email: gmahardikasetiabudi@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) plays an important role in the sustainability of urban environments. Bungkul Park, Surabaya, as one of the GOS icons, faces challenges from informal economic activities, especially street vendors (PKL). This study aims to analyze the strategy for arranging street vendors in Bungkul Park with a focus on the balance of ecological, aesthetic, and social functions of GOS. Qualitative descriptive methods are used to evaluate the distribution patterns of street vendors, location selection factors, and implementation of local policies. The results show that the success of the arrangement depends on location accessibility, visibility, and stakeholder involvement. Optimal arrangement requires an integrated approach between policy and community needs.

Keywords: *green open space, urban planning, street vendors*

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan penting dalam keberlanjutan lingkungan perkotaan. Taman Bungkul Surabaya, sebagai salah satu ikon RTH, menghadapi tantangan dari aktivitas ekonomi informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penataan PKL di Taman Bungkul dengan fokus pada keseimbangan fungsi ekologis, estetis, dan sosial RTH. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran PKL, faktor pemilihan lokasi, dan implementasi kebijakan lokal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan penataan PKL memerlukan pertimbangan mengenai aksesibilitas, visibilitas, manajemen lalu lintas pengunjung, fasilitas tambahan seperti parkir, dan fleksibilitas lokasi untuk perluasan di masa depan.

Kata kunci: *ruang terbuka hijau, penataan kota, pedagang kaki lima*

Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan. Fungsi ekologis RTH, seperti penyediaan udara bersih, pengendalian suhu, dan habitat bagi flora serta fauna, menjadikannya elemen vital dalam pembangunan kota berkelanjutan (Miharja *et al.*, 2018). Selain itu, RTH memiliki fungsi estetis sebagai sarana rekreasi dan peningkatan kualitas lanskap kota, serta fungsi sosial sebagai ruang interaksi dan aktivitas masyarakat. Dengan berbagai fungsi tersebut, RTH menjadi komponen integral yang harus dipertahankan dan ditata secara optimal (Aulia *et al.*, 2020).



Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk usaha sektor informal yang signifikan di perkotaan, seringkali mendominasi pusat keramaian seperti taman kota. Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Winoto & Budiani (2017) ciri-ciri tersebut meliputi merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen, ada yang menetap atau bergerak, menjajakan bahan makanan/minuman/barang konsumsi lainnya secara eceran, umumnya bermodal kecil, kualitas barang relatif rendah, volume peredaran uang tidak seberapa besar, usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, dan tawar menawar merupakan ciri khas. Keberadaan mereka memberikan dampak ekonomi positif dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, khususnya di sektor informal. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang dianggap penting oleh PKL dalam penataan lokasi, seperti aksesibilitas, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, persaingan, lingkungan, dan peraturan pemerintah (Tjiptono, 2002), sangat krusial untuk menciptakan program penataan yang efisien dan efektif.

Penataan dan pemberdayaan PKL di Indonesia dilandasi oleh payung hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 ini merupakan payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan kota, serta meningkatkan kesejahteraan PKL. Peraturan ini mengatur mengenai penentuan lokasi berjualan PKL, perizinan, serta penataan fisik lapak. pemerintah didorong untuk memberikan berbagai bentuk pemberdayaan kepada PKL. Di Kota Surabaya, kebijakan spesifik diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur di mana saja PKL diperbolehkan berjualan dan di mana saja yang dilarang, serta wajib memiliki izin untuk berjualan. Selain itu, Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya mewajibkan pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran di Surabaya untuk menyediakan ruang khusus bagi PKL. Implementasi kebijakan ini penting untuk menyeimbangkan fungsi RTH dengan keberlanjutan ekonomi informal, meskipun tantangan dalam penegakan hukum dan sosialisasi selalu menjadi fokus utama.

Namun, seiring perkembangan kota, tantangan muncul dalam pengelolaan RTH, salah satunya adalah maraknya aktivitas ekonomi informal yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Aktivitas PKL di ruang publik seperti taman kota seringkali memicu permasalahan tata ruang, ketertiban, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya (Siregar, 2019). Keberadaan PKL, di sisi lain, memberikan dampak positif dalam perekonomian masyarakat dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, terutama bagi sektor informal (Widodo, 2017).

Taman Bungkul di Surabaya merupakan contoh konkret dari permasalahan ini. Sebagai salah satu ikon RTH kota Surabaya, Taman Bungkul memiliki daya tarik yang tinggi sebagai ruang publik untuk warga. Namun, popularitas Taman Bungkul turut menarik minat PKL untuk berjualan di sekitar area taman. Aktivitas PKL di lokasi ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi pedagang itu sendiri maupun pengunjung taman. Akan



tetapi, keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik menimbulkan persoalan tata ruang, kebersihan, estetika, dan kenyamanan pengunjung taman (Rudianto & Prasetyo, 2021).

Kondisi ini menuntut adanya strategi penataan yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis, estetis, dan sosial RTH dengan keberlanjutan ekonomi para PKL. Penataan yang tepat akan menciptakan *win-win solution*, di mana taman sebagai ruang publik dapat berfungsi optimal, sementara aktivitas ekonomi informal tetap berjalan secara tertib dan terorganisir (Hidayati, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pola penyebaran PKL, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi berjualan, serta implementasi kebijakan penataan PKL di Taman Bungkul Surabaya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori yang relevan agar solusi yang dihasilkan dapat diaplikasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penataan PKL di Taman Bungkul secara mendalam dan sistematis (Creswell, 2014). Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terkait pola penyebaran PKL, dan implementasi kebijakan penataan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, kebijakan pemerintah terkait ruang terbuka hijau dan penataan PKL, serta penelitian terdahulu yang relevan, meliputi jurnal, buku, laporan, dan dokumen kebijakan. Sementara itu, kajian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan kebijakan pemerintah, seperti peraturan terkait ruang terbuka hijau dan penataan PKL, untuk memahami landasan kebijakan yang ada. Penelitian ini memberikan fokus pada analisis implementasi kebijakan penataan PKL agar dapat menjaga fungsi ekologis, estetis, dan sosial RTH sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi informal di Taman Bungkul.

Pembahasan

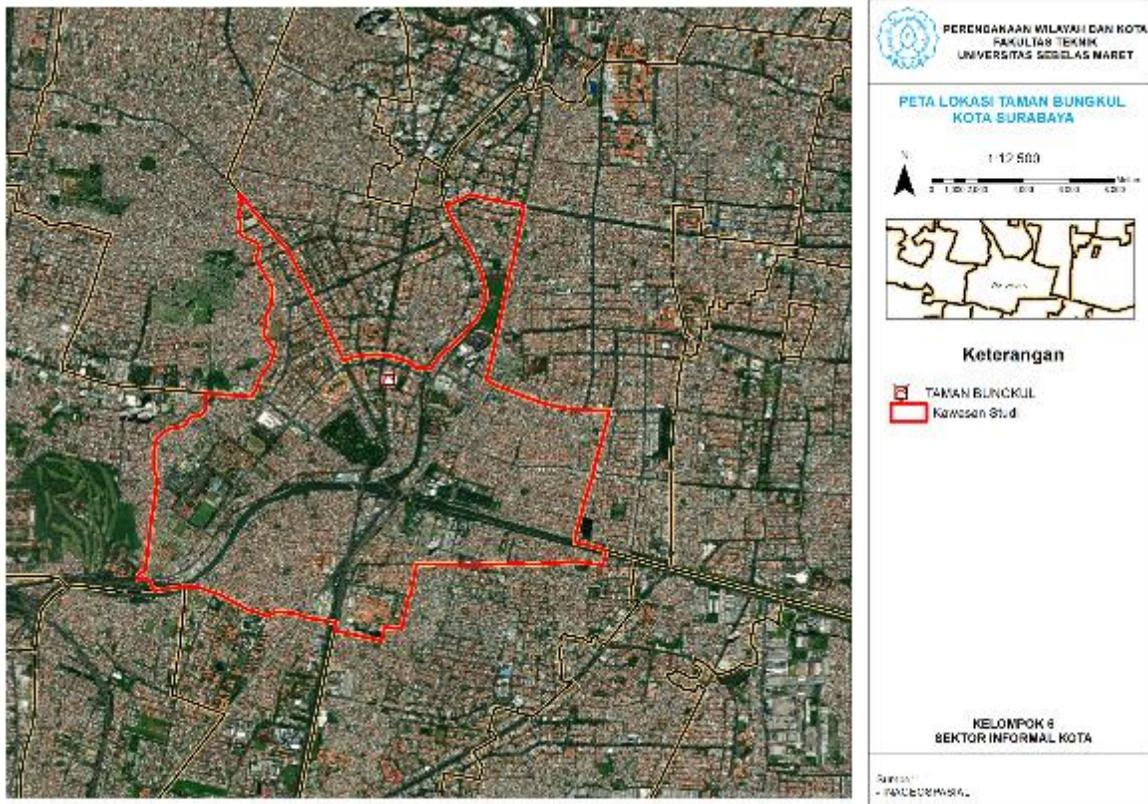
Gambaran Umum

Taman Bungkul, salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat Kota Surabaya, memiliki peran penting dalam mendukung fungsi ekologis, estetis, dan sosial bagi masyarakat. Taman ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi yang nyaman, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, terutama melalui keberadaan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL). Dilengkapi dengan fasilitas publik yang lengkap, Taman Bungkul menyediakan air minum gratis, area bermain anak, *skateboard track*, *jogging track*, zona wi-fi gratis, serta air mancur dan tempat duduk untuk bersantai. Keasrian dan kesejukan taman ini menjadikannya destinasi favorit masyarakat Surabaya dan wisatawan. Menurut data Dinas Kebersihan



dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (2023), rata-rata kunjungan ke Taman Bungkul mencapai 1.500 orang per hari, dengan peningkatan hingga 3.000 pengunjung setiap akhir pekan. Keberadaan taman ini tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warganya.

Gambar 1. Lokasi Taman Bungkul Surabaya



Dari Sumber INAGEOSPASIAL, 2024

Sebagai ikon kebanggaan masyarakat Surabaya, Taman Bungkul menawarkan keunikan yang tidak dimiliki oleh taman-taman lain di Indonesia. Penataan PKL ala taman populer ini membuktikan bahwa aktivitas perdagangan informal dapat berjalan harmonis dengan fungsi utama RTH. Inisiatif seperti revitalisasi taman melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Telkom pada tahun 2019 dengan dana sebesar Rp 1,3 miliar menjadi bukti komitmen untuk menjaga kualitas dan daya tarik Taman Bungkul.



Gambar 2. Aktivitas Masyarakat di Taman Bungkul Surabaya



Dari Sumber RRI/pataka, 2024

Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu sentra PKL yang tertata rapi. Para PKL ditempatkan dalam area khusus dengan desain yang mempertimbangkan estetika dan kenyamanan pengunjung. Lokasi ini menarik berbagai kalangan, mulai dari karyawan kantoran, remaja, hingga masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Keberadaan PKL yang terorganisir memberikan kontribusi ekonomi signifikan, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Menurut studi oleh Qisty (2017), penataan PKL di Taman Bungkul telah berhasil menciptakan sinergi antara fungsi ekologis taman dan aktivitas ekonomi informal. Namun, tantangan seperti keberadaan PKL liar di sekitar staman masih menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, optimalisasi penataan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

Gambar 3. Kondisi di Sentra PKL Taman Bungkul Surabaya



Dari Sumber Pujasera, 2024

Program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL di sentra sudah menjadi bagian dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat mempengaruhi faktor politik dalam pelaksanaannya, karena tanggung jawab pemerintah kota adalah



menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ruang untuk berjualan. Taman Bungkul awalnya dilakukan proses revitalisasi dengan dana sebesar Rp 1,3 miliar yang dialokasikan dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Telkom untuk mengatur relokasi PKL Taman

Bungkul. Dengan berbagai fasilitas dan daya tarik yang dimiliki, Taman Bungkul menjadi contoh sukses bagaimana RTH dapat mendukung berbagai fungsi sekaligus, mulai dari ekologi, rekreasi, hingga ekonomi. Sinergi ini menjadikannya model penataan RTH yang dapat diterapkan di kota-kota lain.

Kondisi Taman Bungkul dan PKL

Dalam mengevaluasi kebijakan perlu melihat sejauh mana hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan publik, program yang dibuat harus mampu untuk membantu memecahkan masalah publik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi hambatan, pelaksanaan kebijakan juga harus tahu apa yang dihadapi masyarakat agar tidak salah memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Bungkul telah dilakukan secara merata, sesuai dengan teori William Dunn yang menekankan pemerataan dalam kebijakan. Namun, masih ada beberapa pedagang liar yang berjualan di sekitar taman, mengganggu kenyamanan. Mereka alasan bahwa keuntungan lebih besar jika berjualan di luar SWK karena lokasi lebih terjangkau oleh pengunjung.

Dari awal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan Taman Bungkul, Paguyuban Trisula menjadi wadah komunikasi antara sasaran/target group dengan *stakeholders* telah sepakat untuk tidak mau menerima dana dari pemerintah kota Surabaya terkhusus Dinas Koperasi melainkan menggunakan dana pinjaman. Dalam penerapan program penataan pedagang kaki lima di taman bungkul kota Surabaya sudah berjalan efektif dalam mengatasi permasalahan macet dan ketidaktertiban. Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam upayanya untuk menempatkan dan mengawasi Pedagang Kaki Lima yang ada di pinggiran taman.

Pada Taman Bungkul juga terdapat beberapa program yang efektif dan tidak efektif, seperti halnya program yang terdapat program efektif yang ada di Taman Bungkul Surabaya yaitu *car free day*, donor darah, taman bacaan, dan kesenian tari. Program-program tersebut mampu menarik perhatian masyarakat Surabaya untuk datang ke Taman Bungkul, karena program yang dibuat adalah hasil dari evaluasi sebelumnya sehingga manfaatnya pun tepat sasaran. Berbeda dengan beberapa program yang dinilai masyarakat belum bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali, seperti program bagi bagi *ice cream* gratis yang membuat Taman Bungkul rusak.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 untuk menata PKL dengan mendirikan SWK di Taman Bungkul pada tahun



2019, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebagian PKL masih memilih untuk berjualan di pinggir taman, menunjukkan kurangnya respons terhadap kebijakan ini. Tanggapan positif dari sebagian PKL menunjukkan bahwa SWK memberikan kepastian lokasi untuk berjualan dengan lebih tenang dan aman, serta meningkatkan kenyamanan dan kebersihan di Taman Bungkul. Namun, ada juga PKL yang merespons negatif karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengeluhkan minimnya sosialisasi dan fasilitas pendukung di lokasi baru. Mereka menuntut fasilitas yang lebih memadai dan pendampingan yang intensif dari pemerintah dalam proses relokasi.

Faktor-Faktor Berpengaruh dalam Keberhasilan Penataan PKL

Untuk menjadikan penataan PKL menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu dicari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penataan PKL tidak hanya dari sisi kebijakan tetapi juga dari sisi penerima. Dalam hal ini PKL sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dilakukan penataan PKL adalah memberikan ruang yang lebih baik bagi PKL untuk berdagang sehingga diharapkan dengan adanya ruang yang baik akan mampu meningkatkan kinerja PKL dan mampu meningkatkan ekonomi pelaku PKL. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang dianggap penting oleh PKL dalam sebuah penataan perlu diketahui. Sehingga komponen dalam program penataan PKL yang dilakukan efisien, tepat, dan efektif memenuhi kebutuhan PKL dan perkembangan kota. Sebagaimana temuan sebelumnya tidak semua penataan PKL yang berhasil secara fisik estetika juga berhasil sebagai program pemberdayaan ekonomi PKL.

Penataan PKL sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor ini tidak hanya mencakup aspek kebijakan, tetapi juga perspektif PKL sebagai penerima manfaat. Tujuan utama penataan PKL adalah menciptakan ruang yang mendukung aktivitas perdagangan secara terorganisir, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan ekonomi pelaku PKL. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor kunci yang dianggap signifikan oleh PKL agar program penataan menjadi efisien, tepat, dan efektif, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan kota. Sebagaimana disampaikan oleh Tjiptono (2002), keberhasilan penataan PKL melibatkan delapan faktor utama, yaitu aksesibilitas, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, persaingan, lingkungan, dan peraturan pemerintah.

Analisis Lokasi Strategis Penataan PKL

Teori yang dikemukakan oleh Tjiptono (2002) memberikan kerangka kerja untuk menganalisis lokasi strategis bagi PKL di Taman Bungkul Kota Surabaya yang disesuaikan dengan kondisi eksisting pada karakteristik PKL dan kondisi lingkungan sekitar Taman Bungkul.



a. Aksesibilitas:

Zavestoski & Agyeman (2014) berpendapat bahwa jalan tidak hanya fasilitas fisik dan material yang berfungsi untuk pergerakan orang dan barang, tetapi juga sebagai ruang sosial dan simbol yang signifikan di mana pengguna terkait dengan sistem ekonomi, transportasi, makanan, budaya, sejarah, dan pemerintahan yang saling berhubungan, serta di dalamnya terdapat interaksi antar individu, kelompok dan komunitas. Jalan-jalan perkotaan harus direncanakan sebagai tempat untuk mengakomodir mobilitas dan ruang publik, sehingga memungkinkan pergerakan dengan moda transportasi yang berbeda serta keberlangsungan interaksi sosial, bersantai, dan rekreasi. Singkatnya, jalan-jalan perkotaan dapat menyeimbangkan antara mobilitas dan imobilitas (Papa & Bertolini, 2015).

Evaluasi kemudahan akses ke lokasi PKL yang sudah ada yaitu dapat dijangkau oleh transportasi umum seperti bus, angkot, atau kereta api serta jalur pedestrian yang nyaman. Untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses juga diperlukan penanda untuk memberikan informasi yang interaktif dan memudahkan pengunjung mengenali letak sentra PKL di Taman Bungkul.

b. Visibilitas:

Konsep *Place Making* Bohl (2002), teori ini menekankan pada perancangan ruang publik yang menarik dan mudah diingat. Visibilitas yang baik merupakan bagian penting dari *place making*, di mana lokasi PKL menjadi bagian dari identitas visual lingkungan sekitarnya. *Gestalt Psychology* (Koffka, 1935), Aliran psikologi ini menekankan bahwa manusia mempersepsi objek sebagai keseluruhan yang terorganisir, bukan sebagai kumpulan elemen-elemen terpisah. Prinsip-prinsip Gestalt, seperti *figure-ground*, *proximity*, dan *similarity*, relevan dengan bagaimana visibilitas suatu lokasi PKL dipengaruhi oleh konteks visual sekitarnya.

Lokasi PKL saat ini dapat terlihat dari beberapa sudut taman tetapi karena letaknya yang berada di bagian belakang dari Taman Bungkul mengakibatkan kurangnya visibilitas bagi pengunjung dan seharusnya lokasi PKL dapat lebih terlihat menonjol, misalnya dengan menggunakan tenda atau dekorasi yang menarik.

c. Lalu Lintas:

Menurut Reilly (1931), "hukum" Reilly yaitu mengkaji mengenai pelanggan bersedia menempuh jarak yang lebih jauh ke pusat ritel yang lebih besar karena daya tarik yang lebih tinggi yang mereka berikan kepada pelanggan yang memodelkan pergerakan konsumen antara pusat perbelanjaan berdasarkan ukuran dan jarak. Hukum gravitasi ritel Reilly, yang dikembangkan oleh Reilly (1931), adalah model dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan daya tarik suatu pusat ritel terhadap pelanggan berdasarkan jarak dan ukuran pasar. Menurut hukum ini, daya tarik suatu lokasi ritel (M) berbanding terbalik dengan kuadrat jarak



(d) dari lokasi tersebut. Hukum ini membantu menentukan area perdagangan yang dapat dijangkau oleh suatu pusat ritel berdasarkan titik indifferens antara dua lokasi.

Karena letaknya yang menjorok di dalam Taman Bungkul dan sudah tidak lagi berada di dekat jalan raya mengakibatkan sentra PKL tersebut hanya akan ramai disaat jam berkunjung ramai taman seperti di pagi dan sore hari. Perlu untuk memikirkan bagaimana *flow* pengunjung agar juga bisa tertuju ke sentra PKL tersebut.

d. Tempat Parkir:

Minimnya fasilitas parkir yang memadai menjadi kendala. Untuk meningkatkan kunjungan ke sentra PKL, pengelola perlu menambah area parkir atau menyediakan fasilitas khusus seperti parkir sepeda. Menurut teori aksesibilitas Hansen (2007), integrasi fasilitas pendukung seperti parkir berperan penting dalam memaksimalkan aksesibilitas lokasi. Belum tersedianya tempat parkir yang cukup dan aman untuk pengunjung mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk singgah ke sentra PKL.

Perlu dilakukan untuk menambah area parkir atau menyediakan fasilitas parkir sepeda oleh pengelola taman, Lalu lintas pengunjung di Taman Bungkul memuncak pada pagi dan sore hari, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Namun, jalur pedestrian yang kurang terintegrasi dengan lokasi PKL menyebabkan sebagian besar pengunjung tidak secara otomatis melewati sentra PKL. Optimalisasi jalur pedestrian dengan rekayasa desain yang mengarahkan arus pengunjung ke lapak PKL menjadi solusi untuk meningkatkan daya tarik lokasi ini.

e. Ekspansi:

Perlu menyediakan area yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi PKL karena perlu dipikirkan bagaimana perkembangan PKL hingga beberapa tahun mendatang. Lokasi sentra PKL saat ini memiliki keterbatasan ruang untuk ekspansi. Dengan meningkatnya jumlah PKL di Taman Bungkul, diperlukan area fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan. Perencanaan desain modular untuk ekspansi perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kota agar tetap menjaga estetika taman. Pertumbuhan PKL di masa depan memerlukan ruang yang fleksibel. Desain modular dapat menjadi solusi untuk menyesuaikan kebutuhan ekspansi tanpa mengurangi estetika taman. Hal ini mendukung pandangan Porter (1985) bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan perencanaan yang mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang.

f. Lingkungan:

Lingkungan Taman Bungkul mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari olahraga, bersantai, hingga menikmati kuliner. Lingkungan Taman Bungkul mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Produk PKL perlu disesuaikan dengan karakteristik pengunjung. Sebagai contoh, menyediakan minuman sehat untuk pengunjung yang



berolahraga dapat meningkatkan relevansi produk. Konsep ini mendukung teori Porter (1985) terkait diferensiasi produk sebagai strategi kompetitif.

g. Persaingan:

Di kawasan sentra PKL Taman Bungkul terdapat berbagai jenis usaha PKL yang menjadikan sentra PKL tersebut lebih banyak menyajikan jenis produk usaha milik PKL. Teori Keunggulan Kompetitif Porter (1985), Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui berbagai strategi, termasuk diferensiasi produk, efisiensi biaya, dan fokus pada segmen pasar tertentu. Teori lokasi Hotelling (1929), Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan cenderung berlokasi berdekatan untuk meminimalkan biaya transportasi dan memaksimalkan pangsa pasar. Dalam konteks PKL, lokasi yang berdekatan dengan pesaing dapat menciptakan clustering atau pengelompokan jenis usaha tertentu.

h. Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait penataan PKL ke sentra PKL Taman Bungkul yaitu kebijakan penataan PKL di SWK Taman Bungkul Kota Surabaya telah tercapai dengan mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 yang dilaksanakan melalui Keputusan Walikota nomor 17 tahun 2004.

Penataan PKL di Taman Bungkul didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003, yang mengatur tentang penempatan dan pemberdayaan PKL. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap PKL liar. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan pendampingan intensif kepada PKL untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kesimpulan

Letak pedagang kaki lima (PKL) yang strategis di Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti Taman Bungkul Surabaya penting untuk dilakukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fungsi ekologi, estetika, dan sosial. Studi ini menemukan bahwa pengaturan pedagang kaki lima yang sukses perlu mempertimbangkan aksesibilitas, visibilitas, manajemen lalu lintas pengunjung, fasilitas tambahan seperti parkir, dan fleksibilitas lokasi untuk perluasan di masa depan.

Meskipun Perjanjian Taman Bungkul telah menciptakan sinergi antara fungsi ruang hijau dan kegiatan ekonomi informal, terdapat banyak permasalahan seperti kehadiran pedagang kaki lima ilegal, kurangnya fasilitas pendukung, dan perbedaan respon pedagang kaki lima



terhadap tantangan kebijakan pemukiman kembali masih tetap. Implementasi kebijakan dengan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat dan pedagang kaki lima telah menunjukkan hasil yang baik, namun diperlukan pemantauan yang lebih intensif dan penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan.

Dengan mengoptimalkan aksesibilitas, visibilitas, fasilitas dan pendekatan komprehensif terhadap kebutuhan pedagang kaki lima, Taman Bungkul yang merupakan rencana ruang terbuka hijau yang mendukung kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial kawasan perkotaan lainnya dapat menjadi model yang sukses.

Daftar Pustaka

- Andriani, R. (2019). *Eksistensi Pedagang Sektor Informal di Perkotaan (Studi Kasus Warung Tegal di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aulia, S. A. S., Yudana, G., & Aliyah, I. (2020). Kajian Karakteristik Koridor Jalan Slamet Riyadi Sebagai Ruang Interaksi Sosial Kota Surakarta Berdasarkan Teori Good City Form. *Desa-Kota : Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Pemukiman*, 2(1), 14–30. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v2i1.32648.14-30>
- Bohl, C. C. (2002). *Place making : developing town centers, main streets, and urban villages*. Urban Land Institute.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
- Hansen, W. G. (2007). How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2), 73–76. <https://doi.org/10.1080/01944365908978307>
- Hanum, N. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 72–86. <https://doi.org/10.1234/jse.v1i1.68>
- Hidayati, E. L. (2020). *Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pedal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pejalan Kaki Di Pkor Way Halim Bandar Lampung)* [Thesis (Undergraduate)]. UIN Raden Intan Lampung.
- Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57.
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt Psychology* (1st Edition). Routledge.
- Kwantari, E. (2024). *Connecting the dots; people, place and art at Banyuwangi traditional market* [Undergraduate thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maya, M. D. S., Harianto, S., & Setyowati, R. N. (2023). Dehumanisasi Penertiban SATPOL PP pada Pedagang Kaki Lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya). *Jurnal Neo Societal*, 8(2), 121–130. <https://doi.org/10.52423/jns.v8i2.4>
- Miharja, F. J., Husamah, H., & Muttaqin, T. (2018). Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau sebagai penyerap emisi gas karbon di kota dan kawasan penyangga Kota Malang. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 2(3), 165–174. <https://doi.org/10.36813/jplb.2.3.165-174>
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130–146. <http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>



- Papa, E., & Bertolini, L. (2015). Accessibility and Transit-Oriented Development in European metropolitan areas. *Journal of Transport Geography*, 47(C), 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.07.003>
- Peraturan Daerah Kota Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2003).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2012).
- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2004). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/1404>
- Porter, M. E. (1985). *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- Powatu, V. R. A. (2024). Peran Sektor Informal dalam Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(5), 1–13.
- Qisty, D. A. (2017). Analisis program Kepariwisata Di Taman Bungkul Kota Surabaya Dalam Konteks promosi Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(1), 35–46. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i1.52>
- Rahayu, M. J., Werdingtyas, Rr. R., & Musyawaroh, M. (2016). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penataan PKL sebagai Strategi Penataan Ruang Kota Surakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 7(2), 109–122. <https://doi.org/10.20961/performa.3.1.11130>
- Reilly, W. J. (1931). *The Law of Retail Gravitation*. Knickerbocker Press.
- Simamora, R. J. R. U., & Fadilah, N. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Tata Letak PKL Pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1–19.
- Sinaga, A. (2016). *Analisis Tenaga Kerja Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Tenaga Kerja di Kota Medan* [Masters thesis]. Universitas Negeri Medan.
- Siregar, M. (2019). *Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Langsa dalam Membangun Kota yang Islami dan Ramah Lingkungan* [Doctoral thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sudarma, S. A. E. (2008). Kajian Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Bagian Dari Manajemen Lingkungan Perkotaan di Surabaya. *Jurnal Purifikasi*, 9(2), 155–166.
- Suhardi, B. (2004). Model Potensial Gravitasi Hansen untuk Menentukan Pertumbuhan Populasi Daerah. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 3(1), 28–32.
- Taufik, H. (2020). *Pengaruh Lokasi, Kelengkapan Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Toko Bangunan Atha Mandiri Dukuwaluh)* [Skripsi thesis]. IAIN Purwokerto.
- Tjiptono, F. (2001). *Strategi Pemasaran* (Edisi Kedua). Penerbit Andi.
- Tjiptono, F. (2002). *Manajemen Jasa*. Andi Offset.
- Wertheimer, M. (1938). Laws of organization in perceptual forms. In *A source book of Gestalt psychology* (W. D. Ellis (Ed.), pp. 71–88). Kegan Paul, Trench, Trubner & Company.
- Wibowo, A. F. F., Kaukab, M. E., & Putranto, A. (2021). Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 206–216. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1735>
- Winoto, A., & Budiani, S. R. (2017). Kajian Karakteristik dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1).



JURNAL REKSABUMI

Journal of Urban Regional and Environment Planning :
<http://jurnal.ut.ac.id/reksabumi>

E-ISSN: 2809-638X

Volume 4 Nomor 1, Januari 2025, 81-92
<https://doi.org/10.33830/Reksabumi.v4i1.11227.2025>

Zavestoski, S., & Agyeman, J. (2014). *Incomplete Streets: Processes, practices, and possibilities* (1st Edition). Routledge.